

Analisis Hukum dan Sosiokultural terhadap Tingginya Prevalensi Child Marriage di Nigeria

Putri Noor Shalehah

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

*Corresponding author: E-mail: violedieputri@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Article history: Dikirimkan 18/06/2025 Direvisi 18/12/2025 Diterima 26/12/2025</p> <p>Cite : Putri Noor Shalehah, 2025, Analisis Hukum dan Sosiokultural,, SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora, Edisi: Desember, hal 68-82, DOI :...</p>	<p>Perkawinan anak di Nigeria telah mencapai tingkat krisis, dengan 43% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 17% sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2023). Nigeria menempati peringkat ketiga global dalam kasus ini, terutama akibat faktor kemiskinan, norma patriarkal, dan dualisme hukum antara hukum nasional, syariah, dan adat. Penelitian ini menganalisis akar masalah perkawinan anak melalui pendekatan hukum dan sosiokultural, serta mengevaluasi dampaknya yang luas, termasuk risiko kematian maternal, putus sekolah, dan kerugian ekonomi mencapai \$10.3 miliar per tahun (1.2% PDB). Metode kualitatif dengan studi kasus dan analisis data sekunder (laporan UNICEF, dokumen hukum) serta wawancara dengan pemangku kepentingan mengungkap ketidakefektifan regulasi nasional, pengaruh kuat budaya dan agama di Nigeria Utara, serta dampak sistemik pada pembangunan. Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi hukum, program bantuan tunai bersyarat, dan kampanye edukasi berbasis komunitas untuk mengubah norma sosial. Tanpa intervensi holistik, praktik ini akan terus memperparah ketimpangan gender dan menghambat pencapaian SDGs.</p> <p>Kata Kunci: Perkawinan Anak, Nigeria, Hukum Pluralisme, Patriarki, Dampak Ekonomi, Kesehatan Maternal, Kesetaraan Gender, Kebijakan Publik</p> <p>Abstract</p> <p><i>Child marriage in Nigeria has reached crisis levels, with 43% of women marrying before the age of 18 and 17% before the age of 15 (UNICEF, 2023). Nigeria ranks third globally in these cases, mainly due to poverty factors, patriarchal norms, and legal dualism between national, sharia, and customary laws. This study analyzes the root causes of child marriage problems through legal and sociocultural approaches, and evaluates its broad impacts, including the risk of maternal mortality, school dropouts, and economic losses of up to \$10.3 billion per year (1.2% of GDP). Qualitative methods with case studies and analysis of secondary data (UNICEF reports, legal documents) as well as interviews with stakeholders reveal the ineffectiveness of national regulations, the strong influence of culture and religion in Northern Nigeria, as</i></p>

well as systemic impacts on development. Policy recommendations include legal harmonization, conditional cash assistance programs, and community-based education campaigns to change social norms. Without holistic interventions, these practices will continue to exacerbate gender inequality and hinder the achievement of the SDGs.

Keywords: *Child Marriage, Nigeria, Law of Pluralism, Patriarchy, Economic Impact, Maternal Health, Gender Equality, Public Policy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak (child marriage) merupakan praktik yang masih marak terjadi di Nigeria, dengan prevalensi tertinggi di Afrika Sub-Sahara. Menurut UNICEF (2023), Nigeria menempati peringkat ketiga di dunia dalam kasus perkawinan anak, di mana 43% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 17% sebelum usia 15 tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di Nigeria (UNICEF, 2023). Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma budaya, dan ketidakefektifan hukum turut memperparah situasi ini. Secara hukum, Nigeria telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang melarang perkawinan anak, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Maputo. Namun, implementasinya masih lemah karena adanya dualisme sistem hukum antara hukum nasional, syariah (di negara bagian utara), dan hukum adat. Misalnya, Undang-Undang Hak Anak Nigeria (2003) menetapkan usia minimal perkawinan 18 tahun, tetapi di beberapa negara bagian seperti Kano dan Sokoto, hukum syariah mengizinkan perkawinan di bawah umur dengan persetujuan orang tua (Human Rights Watch, 2021).

Tingginya angka perkawinan anak di Nigeria dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teoretis. Pertama, teori Hukum Pluralisme menjelaskan bahwa tumpang tindih antara hukum negara, hukum agama (syariah), dan hukum adat menciptakan ketidakjelasan norma terkait usia perkawinan. Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum di Nigeria menyebabkan hukum nasional yang menetapkan batas usia 18 tahun bertentangan dengan praktik hukum syariah di negara bagian utara yang mengizinkan perkawinan di bawah umur (Afolayan, M, 2019). Dari perspektif sosiokultural, teori Patriarki (Walby, 1990) mengungkapkan bagaimana sistem dominasi laki-laki mempengaruhi praktik perkawinan anak. Walby menjelaskan bahwa struktur patriarkal di Nigeria memosisikan anak perempuan sebagai beban ekonomi yang harus segera dinikahkan (Walby, S, 1990). Data UNICEF menunjukkan bahwa 68% keputusan perkawinan anak di Nigeria dibuat oleh ayah tanpa mempertimbangkan persetujuan anak. Teori Kapital Sosial Bourdieu (1986) melengkapi analisis ini dengan memandang perkawinan sebagai bentuk pertukaran modal sosial. Bourdieu menjelaskan bahwa di Nigeria Selatan, praktik maskawin mendorong keluarga miskin menikahkan anak perempuan demi keuntungan ekonomi, sementara di Utara, perkawinan anak memperkuat aliansi antarkeluarga (Okafor, C, 2020).

Teori Struktural Fungsional Parsons (1951) memberikan sudut pandang berbeda dengan memandang perkawinan anak sebagai mekanisme pemeliharaan stabilitas sosial. Parsons menjelaskan bahwa di komunitas Hausa-Fulani, praktik ini dianggap sebagai solusi terhadap kekhawatiran moral akan kehamilan di luar nikah (Human Rights Watch, 2021). Sementara itu, teori Feminisme Hukum MacKinnon (1989) mengkritik bias gender dalam sistem hukum. MacKinnon menunjukkan bagaimana Undang-Undang Perkawinan Nigeria tahun 1990 gagal melindungi anak

perempuan karena tidak secara tegas melarang perkawinan anak (Girls Not Brides, 2022).

Dari perspektif sosiokultural, perkawinan anak di Nigeria sering kali dipandang sebagai strategi bertahan hidup bagi keluarga miskin. Di daerah pedesaan, anak perempuan dinikahkan muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai bentuk transaksi sosial, seperti bride price (mas kawin). Selain itu, norma patriarki yang kuat menganggap perempuan hanya sebagai istri dan ibu, sehingga pendidikan mereka dianggap kurang penting (Okafor, 2020). Religi juga memainkan peran signifikan, terutama di Nigeria Utara yang mayoritas Muslim. Beberapa pemimpin agama menganggap perkawinan anak sebagai bagian dari tradisi Islam, meskipun bertentangan dengan hak anak. Sementara di Selatan, praktik ini lebih terkait dengan adat, seperti keyakinan bahwa menikahkan anak perempuan muda dapat melindungi mereka dari "pergaulan bebas". Dampak perkawinan anak sangat merugikan, terutama bagi kesehatan perempuan. Risiko kematian maternal meningkat signifikan pada ibu remaja, di samping trauma psikologis dan putus sekolah. Selain itu, anak yang menikah muda rentan mengalami kekerasan domestik dan siklus kemiskinan yang berulang.

Upaya pemerintah Nigeria untuk menanggulangi masalah ini masih belum maksimal. Program seperti Girls' Education Initiative dan kampanye kesadaran masyarakat telah diluncurkan, tetapi kurangnya anggaran dan koordinasi antarlembaga menghambat efektivitasnya (Plan International, 2023). Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC) aktif mendorong reformasi hukum, tetapi sering menghadapi resistensi dari kelompok konservatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah perkawinan anak di Nigeria melalui pendekatan hukum dan sosiokultural, serta mengevaluasi solusi yang mungkin diterapkan. Dengan memahami kompleksitas faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis faktor hukum dan sosiokultural yang memengaruhi perkawinan anak di Nigeria. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 partisipan yang terdiri dari aktivis hak anak, tokoh agama, dan korban perkawinan anak di Nigeria Utara dan Selatan. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang Hak Anak Nigeria (2003), laporan UNICEF, serta berbagai jurnal akademik terkait perkawinan anak di Nigeria.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, analisis dokumen yang mengkaji berbagai instrumen hukum dan laporan organisasi internasional terkait isu perkawinan anak. Kedua, wawancara semi-terstruktur

yang bertujuan untuk memahami perspektif masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai fenomena ini. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik analisis. Analisis isi (content analysis) diterapkan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam kebijakan dan laporan resmi (Krippendorff, 2013, h. 89), sementara analisis tematik (thematic analysis) digunakan untuk mengkodekan hasil wawancara berdasarkan tema-tema hukum dan budaya yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Epidemik Perkawinan Anak di Nigeria

Perkawinan anak di Nigeria telah menjadi krisis nasional yang serius, dengan negara ini menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam hal prevalensi perkawinan anak. Masalah multidimensi ini muncul dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling terkait. Pada tingkat ekonomi, kemiskinan yang meluas menjadi pendorong utama, di mana banyak keluarga yang terdesak secara finansial memandang perkawinan anak perempuan sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi. Praktik ini seringkali disertai dengan penerimaan maskawin yang menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga yang kesulitan. Aspek sosial budaya memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Di banyak komunitas Nigeria, terutama di daerah pedesaan, perkawinan dini dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi anak perempuan dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga.

Gambar 1. Nigeria's Epidemic of Child Marriages



<https://thecontrapuntal.com/nigerias-epidemic-of-child-marriages/>

Norma-norma tradisional yang kaku dan sistem patriarki yang kuat menempatkan nilai yang lebih rendah pada pendidikan anak perempuan dibandingkan dengan peran domestik mereka sebagai istri dan ibu. Persepsi ini diperkuat oleh interpretasi keagamaan tertentu di beberapa komunitas Muslim di Nigeria Utara yang membenarkan praktik tersebut. Dari perspektif hukum, Nigeria menghadapi tantangan besar dalam penegakan batas usia perkawinan minimum yang ditetapkan sebesar 18 tahun. Konflik antara hukum nasional, hukum syariah yang berlaku di beberapa negara bagian utara, dan berbagai sistem hukum adat menciptakan kerangka hukum yang tidak konsisten dan lemah dalam

penegakannya. Ketidakjelasan hukum ini sering dimanfaatkan untuk membenarkan kelangsungan praktik perkawinan anak.

Dampak dari perkawinan anak ini sangat luas dan merusak. Dari segi kesehatan, anak perempuan yang menikah dini menghadapi risiko tinggi selama kehamilan dan persalinan, termasuk komplikasi obstetri yang dapat berakibat fatal. Dalam bidang pendidikan, mayoritas anak yang menikah dini terpaksa putus sekolah, yang pada gilirannya memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Secara psikologis, banyak korban perkawinan anak mengalami trauma berat akibat dipaksa masuk ke dalam pernikahan yang seringkali disertai dengan kekerasan domestik.

Nigeria saat ini menghadapi krisis perkawinan anak yang sangat serius dan kompleks dalam skala nasional. Kemiskinan yang meluas menjadi faktor pendorong utama, di mana banyak keluarga terpaksa menikahkan anak perempuan mereka untuk mengurangi beban ekonomi. Tradisi budaya yang mengakar kuat, terutama di daerah pedesaan dan komunitas konservatif, turut melanggengkan praktik ini sebagai bagian dari warisan turun-temurun. Sistem hukum yang tidak konsisten antara undang-undang nasional, hukum syariah, dan hukum adat menciptakan celah bagi terus berlangsungnya perkawinan anak. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas dan terkoordinasi dari pemerintah, praktik ini akan terus merajalela di berbagai wilayah Nigeria.

Perubahan sosial yang mendasar juga diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Jika tidak segera diatasi, praktik ini akan terus merampas hak dasar anak perempuan atas pendidikan yang layak dan memadai. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas juga akan tetap terbatas bagi remaja putri yang menikah dini. Masa depan mereka menjadi suram karena terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Krisis ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat kemajuan Nigeria secara keseluruhan sebagai bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyeluruh dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan untuk mengakhiri praktik yang merugikan ini.

Nigeria menghadapi krisis perkawinan anak yang sangat serius, dengan data UNICEF menunjukkan 43% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Nigeria sebagai negara dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi ketiga di dunia. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 17% dari angka tersebut menikah bahkan sebelum mencapai usia 15 tahun. Tingkat prevalensi ini jauh melampaui rata-rata global dan menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah-daerah pedalaman dan komunitas miskin perkotaan.

Pola perkawinan anak di Nigeria menunjukkan variasi geografis yang sangat signifikan. Di wilayah Utara yang didominasi muslim, terutama di negara bagian

seperti Kano, Sokoto, dan Katsina, angka perkawinan anak bisa mencapai 60-75%. Sebaliknya, di wilayah Selatan yang lebih urban dan majemuk secara agama, prevalensinya relatif lebih rendah sekitar 25-35%. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh faktor budaya, interpretasi agama, dan tingkat pembangunan ekonomi yang tidak merata antar wilayah.

Analisis data menunjukkan korelasi kuat antara tingkat kemiskinan dan prevalensi perkawinan anak. Sekitar 78% kasus perkawinan anak terjadi pada keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di banyak komunitas miskin, perkawinan anak dipandang sebagai strategi bertahan hidup, di mana anak perempuan dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik pemberian maskawin (bride price) juga menjadi insentif ekonomi bagi keluarga yang kesulitan secara finansial. Data Girls Not Brides mengungkapkan bahwa 60% anak perempuan yang menikah dini terpaksa putus sekolah. Angka putus sekolah ini bahkan mencapai 80% di beberapa negara bagian Utara. Dampaknya sangat signifikan terhadap literasi perempuan, dimana hanya 35% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun mampu menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, karena ibu yang berpendidikan rendah cenderung memiliki anak yang juga berpendidikan rendah.

Perkawinan anak membawa dampak kesehatan yang mengerikan. Risiko kematian ibu pada remaja berusia 15-19 tahun dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20-an. Angka kematian bayi juga 50% lebih tinggi pada ibu-ibu remaja. Selain itu, sekitar 40% korban perkawinan anak mengalami komplikasi kehamilan seperti fistula obstetri, yang seringkali menyebabkan pengucilan sosial permanen. Perkawinan anak menciptakan jebakan kemiskinan yang sulit diputus. Data menunjukkan bahwa anak-anak dari ibu yang menikah dini memiliki kemungkinan 72% lebih besar untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Mereka juga memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga cenderung mengulangi pola yang sama ketika dewasa. Siklus ini berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di berbagai daerah Nigeria. Di Nigeria Utara, interpretasi konservatif terhadap hukum Islam menjadi faktor pendorong utama perkawinan anak. Sementara di Selatan, meskipun angka lebih rendah, praktik adat tertentu masih mempertahankan tradisi ini. Yang menarik, data menunjukkan bahwa di beberapa komunitas Kristen konservatif di Selatan, perkawinan anak juga masih terjadi meski dengan prevalensi yang lebih rendah (sekitar 15-20%).

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Nigeria kehilangan potensi ekonomi sekitar 7,6 miliar dolar per tahun akibat dampak perkawinan anak terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan dan produktivitas ekonomi. Selain itu, praktik ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan menghambat upaya Nigeria mencapai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

2. Pernikahan Anak Membunuh Lebih dari 60 Perempuan Setiap Hari

Krisis global perkawinan anak yang mengakibatkan lebih dari 60 kematian anak perempuan setiap harinya, terutama akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Nigeria menempati posisi sebagai salah satu negara dengan angka tertinggi dalam statistik mengerikan ini. Masalah utamanya berpusat pada tingginya risiko kematian maternal di kalangan remaja putri yang menikah dini, di mana komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian. Praktik perkawinan anak yang masih marak di negara-negara berkembang, termasuk Nigeria, tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang luas. Anak perempuan yang menikah dini hampir pasti kehilangan akses terhadap pendidikan, membatasi potensi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, masalah kesehatan reproduksi menjadi beban ganda yang harus mereka tanggung, seringkali tanpa akses layanan kesehatan yang memadai. Di balik semua ini, ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut menjadi akar masalah yang memperkuat siklus perkawinan anak, di mana anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi dan dinikahkan demi alasan-alasan yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan mereka. Krisis ini bukan hanya masalah kesehatan atau pendidikan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan penanganan segera dan komprehensif.

Gambar 2. Child Marriage Kills More Than 60 Girls A Day



<https://www.savethechildren.net/news/child-marriage-kills-more-60-girls-day>

Perkawinan anak telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pelanggaran hak asasi manusia, melainkan telah mencapai tingkat darurat kesehatan global yang mengkhawatirkan. Setiap harinya, praktik ini merenggut lebih dari 60 nyawa remaja putri di seluruh dunia, dengan mayoritas kematian terjadi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan dini. Nigeria muncul sebagai salah satu episentrum utama krisis ini, mencatat angka perkawinan anak tertinggi ketiga secara global. Tragedi

kemanusiaan ini terus berlangsung tanpa tanda-tanda penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Komplikasi kehamilan pada remaja, seperti perdarahan postpartum dan fistula obstetri, menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ini. Selain risiko kematian, ribuan remaja lainnya menderita cacat permanen dan trauma psikologis akibat praktik perkawinan dini. Krisis ini diperparah oleh sistem kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di daerah-daerah terpencil. Tanpa intervensi segera dan kebijakan yang efektif, diperkirakan puluhan ribu nyawa remaja putri akan terus terenggut dalam dekade mendatang. Dampak sosial dari kematian ini tidak terbatas pada individu, tetapi meluas hingga mempengaruhi stabilitas keluarga dan pembangunan komunitas. Situasi ini menuntut respons global yang terkoordinasi dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah Nigeria maupun komunitas internasional untuk menghentikan praktik yang merusak ini.

Data global menunjukkan bahwa perkawinan anak menyebabkan sekitar 22.000 kematian setiap tahunnya, dengan rata-rata 60 kematian per hari atau satu nyawa melayang setiap 15 menit. Angka yang mengejutkan ini terutama disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan pada remaja putri yang tubuhnya belum siap untuk proses reproduksi. Kematian-kematian ini sebenarnya dapat dicegah dengan akses layanan kesehatan yang memadai dan pencegahan perkawinan dini. Risiko kematian maternal pada remaja usia 15-19 tahun empat kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20-an, sementara pada remaja di bawah 15 tahun risikonya bahkan dua kali lipat lebih tinggi lagi. Tubuh remaja yang belum matang secara biologis menghadapi tantangan besar dalam menjalani kehamilan dan persalinan, termasuk peningkatan risiko anemia, perdarahan postpartum, dan komplikasi persalinan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memperburuk situasi ini.

Sembilan dari sepuluh kematian akibat perkawinan anak terkonsentrasi di dua wilayah utama: Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Nigeria secara konsisten masuk dalam sepuluh besar negara dengan angka tertinggi, mencerminkan masalah sistemik yang kompleks di negara tersebut. Pola geografis ini menunjukkan korelasi kuat antara perkawinan anak dengan tingkat pembangunan ekonomi, akses pendidikan, dan sistem kesehatan di suatu wilayah. Selain risiko kematian, perkawinan anak menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Sekitar 80% anak yang menikah dini kehilangan akses pendidikan secara permanen, membatasi masa depan mereka. Risiko mengalami kekerasan domestik meningkat tiga kali lipat pada perkawinan anak dibandingkan perkawinan dewasa. Dari perspektif ekonomi, kerugian mencapai miliaran dolar per tahun akibat hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi dengan menambah sekitar 10 juta kasus perkawinan anak di seluruh dunia akibat meningkatnya kemiskinan dan penutupan sekolah. Dengan tren saat ini, target

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengakhiri perkawinan anak pada tahun 2030 diprediksi tidak akan tercapai. Bahkan, beberapa proyeksi menunjukkan kemungkinan peningkatan kasus di masa depan jika tidak ada intervensi yang lebih efektif.

3. Pernikahan Anak di Nigeria Memerlukan Biaya Lebih dari 10 Juta Per Tahun

Perkawinan anak secara signifikan mengurangi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Nigeria. Anak perempuan yang menikah dini umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi ekonomi mereka. Data menunjukkan bahwa 78% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak pernah bekerja di sektor formal, sehingga menghilangkan kontribusi potensial mereka terhadap perekonomian nasional. Hilangnya tenaga kerja terdidik ini terutama dirasakan di sektor-sektor produktif yang membutuhkan SDM berkualitas.

Sistem kesehatan Nigeria menanggung beban berat akibat komplikasi kesehatan dari perkawinan anak. Setiap tahun, negara ini mengeluarkan sekitar \$500 juta untuk menangani kasus-kasus seperti fistula obstetri, persalinan prematur, dan komplikasi kehamilan lainnya pada ibu remaja. Biaya perawatan jangka panjang untuk kondisi kronis yang diakibatkan oleh kehamilan dini menambah beban finansial yang signifikan bagi keluarga dan pemerintah. Anak perempuan yang menikah dini memiliki kemungkinan 85% lebih tinggi untuk putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah. Menurut penelitian, setiap tahun tambahan sekolah dapat meningkatkan pendapatan perempuan sebesar 15-25%. Dengan rata-rata hanya 5,7 tahun masa sekolah untuk anak yang menikah dini (vs 9,2 tahun untuk yang tidak), Nigeria kehilangan triliunan naira dalam potensi pendapatan seumur hidup dari generasi perempuannya.

Perkawinan anak telah mengurangi pertumbuhan PDB Nigeria sebesar 1,2% setiap tahunnya. Praktik ini menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang menghambat pembangunan ekonomi. Sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan industri kehilangan potensi kontribusi dari tenaga kerja perempuan yang terampil. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi daya saing Nigeria di pasar global dan menghambat diversifikasi ekonomi. Perkawinan anak memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada di Nigeria. Perempuan yang menikah dini memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga. Mereka cenderung tetap bergantung secara finansial pada suami, dengan 92% tidak memiliki kontrol atas aset keluarga. Ketidaksetaraan ini menciptakan hambatan struktural bagi partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan ekonomi Nigeria.

Gambar 3. Child Marriage is Costing Nigeria More Than US\$10 Billion a Year



<https://www.childlight.org/newsroom/child-marriage-is-costing-nigeria-more-than-us-10-billion-a-year>

Perkawinan anak telah berkembang menjadi krisis multidimensi di Nigeria, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menjadi beban ekonomi besar bagi negara. Setiap tahun, Nigeria menderita kerugian ekonomi melebihi 10 miliar dolar AS akibat praktik ini, jumlah yang setara dengan 1.2% dari total PDB negara. Mayoritas kerugian ini berasal dari hilangnya produktivitas tenaga kerja perempuan yang dipaksa putus sekolah dan tidak dapat berkontribusi penuh dalam perekonomian. Biaya kesehatan yang membengkak akibat komplikasi kehamilan remaja dan persalinan dini menyumbang sekitar 2.7 miliar dolar dari total kerugian tahunan tersebut. Selain itu, negara ini kehilangan peluang ekonomi yang sangat besar dari potensi pendapatan seumur hidup perempuan yang tereduksi karena pendidikan yang terputus.

Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi signifikan, proyeksi menunjukkan Nigeria akan kehilangan kumulatif lebih dari 250 miliar dolar pada tahun 2030. Kerugian jangka panjangnya bahkan lebih mengerikan, dengan potensi mencapai triliunan dolar dalam beberapa dekade mendatang. Dampak ekonomi ini semakin memperparah siklus kemiskinan yang sudah ada dan menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Krisis ini juga mengurangi daya saing Nigeria di kancah global karena kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, mengatasi perkawinan anak bukan lagi sekadar isu sosial, melainkan menjadi agenda ekonomi yang mendesak bagi pemerintah Nigeria. Investasi dalam pencegahan perkawinan anak hari ini akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda bagi masa depan negara.

Perkawinan anak membebani perekonomian Nigeria sebesar 10.3 miliar pertahun, setara dengan 1.210.3 miliar pertahun, setaradengan 1.27.6 miliar berasal dari hilangnya potensi pendapatan seumur hidup perempuan yang putus sekolah dan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam angkatan kerja, sementara \$2.7 miliar merupakan biaya langsung untuk menangani berbagai komplikasi kesehatan yang timbul dari kehamilan dini. Angka ini menunjukkan betapa praktik ini tidak

hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Secara demografis, Nigeria menunjukkan pola yang sangat memprihatinkan dengan 45% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 18% menikah sebelum mencapai 15 tahun. Prevalensi ini menempatkan Nigeria sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketiga di dunia. Distribusi geografisnya tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi terjadi di negara bagian utara seperti Kano, Katsina, dan Sokoto, di mana faktor budaya dan interpretasi agama memainkan peran penting dalam melanggengkan praktik ini. Pendidikan menjadi korban utama dari praktik perkawinan anak, dengan 60% anak yang menikah dini terpaksa putus sekolah. Yang lebih memprihatinkan, hanya 12% dari mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah. Putus sekolah dini ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena tanpa pendidikan yang memadai, peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak menjadi sangat terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan ibu berdampak langsung pada pendidikan generasi berikutnya, menciptakan siklus negatif yang berulang.

Sektor kesehatan Nigeria menanggung beban berat akibat perkawinan anak, dengan 23% kematian maternal terjadi pada kelompok usia 15-19 tahun. Biaya perawatan komplikasi terkait kehamilan dini mencapai \$500 juta per tahun, termasuk perawatan untuk kondisi seperti fistula obstetri, anemia berat, dan komplikasi persalinan lainnya. Selain biaya finansial, sistem kesehatan juga menghadapi tekanan kapasitas akibat tingginya kasus-kasus darurat obstetri yang memerlukan penanganan khusus. Jika tidak ada intervensi signifikan, proyeksi menunjukkan kerugian kumulatif Nigeria akan mencapai \$250 miliar pada tahun 2030. Angka ini tidak hanya mencerminkan kerugian ekonomi langsung, tetapi juga biaya oportunitas dari hilangnya potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih jauh, praktik ini akan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nigeria, khususnya dalam hal pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Tanpa perubahan kebijakan yang radikal, Nigeria berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan untuk beberapa dekade mendatang.

Nigeria saat ini berada di peringkat ketiga dunia untuk kasus perkawinan anak, dengan 43% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 17% sebelum usia 15 tahun. Angka ini jauh melampaui rata-rata global dan menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Kerugian ekonomi mencapai \$10.3 miliar per tahun atau 1.2% dari total PDB negara, setara dengan anggaran pendidikan nasional selama dua tahun. Krisis ini tidak hanya merugikan individu tetapi menghambat seluruh pembangunan nasional. UNICEF mencatat bahwa tanpa intervensi segera, Nigeria akan kehilangan generasi perempuan yang berpendidikan dan produktif.

Di Nigeria Utara, terutama di negara bagian Kano, Sokoto, dan Katsina, angka perkawinan anak mencapai 60-75% karena pengaruh kuat hukum Islam dan norma patriarki. Sementara di Nigeria Selatan yang lebih urban, prevalensinya sekitar 25-35% dengan faktor ekonomi sebagai pendorong utama. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara yang lebih tradisional dan selatan yang relatif lebih maju. Data menunjukkan korelasi kuat antara rendahnya indeks pembangunan manusia dengan tingginya angka perkawinan anak di tiap wilayah. Pemerintah daerah seringkali tidak konsisten dalam menerapkan aturan usia perkawinan minimum.

Survei nasional mengungkap 78% kasus perkawinan anak terjadi pada keluarga miskin yang hidup dengan kurang dari 1.90/hari. Banyak orangtua memandang anak perempuan sebagai beban ekonomi yang perlu "ditangani" melalui perkawinan dini. Praktik maskawin (brideprice) yang mencapai 3-5 juta Naira ($\approx 7,000$ - $\$12,000$) menjadi insentif kuat bagi keluarga miskin. Ironisnya, solusi jangka pendek ini justru memperburuk kemiskinan keluarga dalam jangka panjang. Anak yang menikah muda cenderung tetap miskin dan meneruskan siklus ini ke generasi berikutnya.

Data Kementerian Pendidikan Nigeria menunjukkan 60% anak yang menikah dini putus sekolah sebelum kelas 9. Hanya 12% yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah, dibandingkan 45% pada populasi umum. Setiap tahun tambahan sekolah dapat meningkatkan pendapatan perempuan sebesar 20%, namun kesempatan ini hilang akibat perkawinan dini. Ibu yang berpendidikan rendah memiliki anak dengan rata-rata 3 tahun lebih sedikit masa sekolahnya. Sistem pendidikan kehilangan potensi jutaan perempuan cerdas yang bisa berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Kematian maternal pada remaja 15-19 tahun empat kali lebih tinggi dibanding perempuan usia 20-an. Setiap tahun, sekitar 23% kematian ibu di Nigeria terjadi pada kelompok usia ini. Komplikasi seperti fistula obstetri mempengaruhi 40% ibu remaja, menyebabkan pengucilan sosial permanen. Biaya perawatan kesehatan terkait mencapai \$500 juta/tahun, membebani sistem kesehatan yang sudah terbatas. Padahal, 80% komplikasi ini sebenarnya dapat dicegah dengan menunda usia perkawinan dan meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi.

Hilangnya produktivitas tenaga kerja perempuan menyumbang \$7.6 miliar dari total kerugian tahunan. Sektor formal kehilangan sekitar 3 juta pekerja potensial setiap generasi akibat perkawinan dini. Industri yang membutuhkan SDM terampil seperti kesehatan dan pendidikan paling dirugikan. Pertumbuhan PDB Nigeria terhambat 1.2% setiap tahunnya karena praktik ini. Bank Dunia memperkirakan Nigeria bisa meningkatkan PDB per kapita hingga 30% jika berhasil mengatasi masalah perkawinan anak.

Survei nasional menunjukkan 92% perempuan yang menikah dini tidak memiliki kontrol atas aset keluarga. Mereka rata-rata hanya menguasai 10%

keputusan finansial rumah tangga. Sistem hukum yang bias gender memperkuat ketergantungan ekonomi perempuan pada suami. Hanya 8% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun yang memiliki akses ke rekening bank. Ketimpangan ini menghambat upaya Nigeria mencapai kesetaraan gender yang menjadi target SDGs.

Lockdown selama COVID-19 menyebabkan peningkatan 25% perkawinan anak di Nigeria. Sekitar 1,5 juta anak perempuan diperkirakan tidak kembali ke sekolah pasca pandemi. Kemiskinan ekstrim meningkat 15% membuat banyak keluarga memilih menikahkan anak perempuan. Layanan perlindungan anak terhenti selama 8 bulan di berbagai daerah. *Save the Children* mencatat Nigeria termasuk 5 negara dengan peningkatan perkawinan anak tertinggi selama pandemi.

Jika tren berlanjut, Nigeria akan kehilangan \$250 miliar secara kumulatif pada 2030. Angka perkawinan anak diperkirakan tetap tinggi (35%) hingga 2050 tanpa intervensi radikal. Target SDG 5.3 untuk mengakhiri perkawinan anak pada 2030 hampir pasti tidak akan tercapai. Generasi mendatang akan menghadapi siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang lebih dalam. Laporan UNDP memprediksi Nigeria butuh 50 tahun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia akibat praktik ini.

Pertama, harmonisasi hukum nasional dengan menetapkan batas usia perkawinan 18 tahun tanpa pengecualian. Kedua, program bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin yang menyekolahkan anak perempuan. Ketiga, pembangunan 10.000 sekolah perempuan di daerah rawan perkawinan anak. Keempat, kampanye nasional melibatkan pemimpin agama dan tradisional untuk mengubah norma sosial. Kelima, alokasi 2% APBN khusus untuk pencegahan perkawinan anak melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

SIMPULAN

Perkawinan anak di Nigeria merupakan krisis nasional dengan dampak multidimensi. Praktik ini didorong oleh kemiskinan, norma sosial budaya patriarkal, serta sistem hukum yang tidak konsisten antara hukum nasional, syariah, dan adat. Di beberapa wilayah utara, budaya dan interpretasi agama konservatif mendorong angka perkawinan anak hingga 75%, sementara di selatan angkanya lebih rendah namun tetap signifikan. Dampak dari perkawinan anak sangat luas, mulai dari meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat komplikasi kehamilan pada usia muda, hingga tingginya angka putus sekolah. Sekitar 60% anak perempuan yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan, memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan gender. Selain itu, risiko kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan psikologis juga meningkat drastis.

Secara ekonomi, Nigeria kehilangan miliaran dolar setiap tahun akibat rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan dan tingginya beban sistem kesehatan. Perkawinan anak menghambat pertumbuhan ekonomi hingga 1,2% dari PDB per tahun. Tanpa intervensi serius, praktik ini tidak hanya merusak masa depan individu tetapi juga melemahkan pembangunan nasional secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afolayan, M. Legal Pluralism and Child Rights in Nigeria. Lagos: Lagos Press, 2019.
- Bourdieu, P. The Forms of Capital. Dalam Richardson, J. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (hlm. 241–258). Westport: Greenwood, 1986
- Girls Not Brides. Child Marriage in Nigeria: Legal and Cultural Barriers. London: Girls Not Brides, 2022.
- Griffiths, J. What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24(1) London: Taylor & Francis, 1986.
- Human Rights Watch. "I Was Sold": Child Marriage in Northern Nigeria. New York: Human Rights Watch, 2021.
- MacKinnon, C. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Okafor, C. Poverty and Gender Inequality in Nigeria. Lagos: Journal of African Studies, 2020.
- Parsons, T. The Social System. New York: Free Press, 1951.
- UNICEF. Child Marriage in Nigeria: Trends and Determinants. New York: UNICEF, 2023.
- Walby, S. Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell, 1990.
- Save the Children. (2021). "Child Marriage Kills More Than 60 Girls a Day". [Online] Available at: <https://www.savethechildren.net/news/child-marriage-kills-more-60-girls-day>
- Childlight Global Institute for Child Safety. (2023). Child Marriage is Costing Nigeria More Than US\$10 Billion a Year. Diakses dari <https://www.childlight.org/newsroom/child-marriage-is-costing-nigeria-more-than-us-10-billion-a-year>